

IDENTIFIKASI JALUR LINTAS NEGARA MELALUI LAUT DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kasman¹

¹Program Magister Teknik Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah
Fakultas Teknik, Universitas Krisnadwipayana
Jl. Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Pondok Gede, Jakarta Timur, 13077.
Hp 0811988444
E-mail: uzai2206@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak - Dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka wilayah perbatasan harus terus dijaga melalui upaya pengamanan dan keamanan di jalur lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi jalur lintas negara melalui laut (pelabuhan) di Provinsi Kepulauan Riau. Analisis yang digunakan diantaranya adalah analisis kebijakan pengembangan wilayah, analisis kondisi fisik wilayah dan analisis potensi pengembangan kawasan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa penumpang yang melewati perlintasan negara mempunyai tipe yang berbeda dalam hal keperluan penumpang yang masuk dan keluar negeri melalui Pos Lintas Batas (PLB). Wilayah ini rawan terhadap penyelundupan narkoba mengingat banyaknya pulau yang tersebar di Provinsi ini. Di Kepulauan Riau belum tersedia PLB yang representatif untuk mengeksport barang/ komoditas hasil alam dan produksi masyarakat lokal ke Negara tetangga.

Kata Kunci : Identifikasi, Jalur Lintas Negara, Pos Lintas Batas.

IDENTIFICATION OF CROSS-COUNTING ROADS THROUGH THE SEA IN THE PROVINCE OF THE RIAU ISLANDS

Abstract - In order to maintain the sovereignty and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), the border areas must continue to be maintained through security and security efforts in cross-country lanes. This study aims to identify cross-country routes by sea (ports) in the Riau Islands Province. The analysis used includes an analysis of regional development policies, an analysis of the physical condition of the region and an analysis of the potential for regional development. The identification results show that passengers who pass through state crossings have different types in terms of the needs of passengers entering and leaving the country through the Cross-Border Post (PLB). This area is prone to drug smuggling considering the many islands scattered in this province. In the Riau Archipelago, there is no representative PLB available for exporting goods/commodities of natural products and the production of local communities to neighboring countries.

Keywords : Identification, Cross-Country Lane, Cross-Border Post.

I. PENDAHULUAN

Secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara terbesar ke-5 (lima) di Dunia yang

menghubungkan 2 (Dua) Benua (Asia - Australia) dan 2 (Dua) Samudera (Hindia dan Pasifik), merupakan jantung jalur perlintasan perdagangan di dunia belahan timur. Di wilayah laut Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara yaitu : India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Kepulauan Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste dan di darat berbatasan dengan 3 (tiga) Negara yaitu ; Malaysia, Papua New Guinea dan Republik Demokratik Timor Leste.

Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan (Indonesia, 2011). Wilayah Perbatasan memiliki nilai strategis baik sebagai titik dasar dalam penetapan garis batas wilayah “Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen” Indonesia. Di darat merupakan halaman dan beranda depan negara yang sekaligus menjadi pusat interaksi sosial budaya dan perekonomian dengan negara tetangga di darat dan interaksi dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta pintu *exit entry point*.

Dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wilayah perbatasan terus dijaga melalui upaya pengamanan dan keamanan. Pemeliharaan, pemanfaatan serta pelestarian terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan infrastruktur moda transportasi dan sarana prasarana lainnya (Indonesia, 2015).

Batas negara memiliki titik-titik perlintasan yang disepakati dan diformalisasikan sebagai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) meliputi (matra : darat, laut dan udara). Keberadaan fungsi PLBN tersebut dengan adanya aktifitas pengawasan dan pelayanan dokumen dengan kehadiran adanya pelayanan bea cukai, migrasi, karantina kesehatan pelabuhan dan Karantina lainnya yang dapat melakukan pemeriksaan dan

pengawasan sesuai tugas dan fungsinya, serta didukung oleh petugas keamanan, pertahanan dengan sistim koordinasi BKO (penugasan) oleh pengelola PLBN yang bersifat *on call* dengan dukungan fasilitas pendukung lainnya (Indonesia, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi Pos Lintas Batas Negara di darat (PLBN) dan perlintasan di laut (pelabuhan), serta aksesibilitas dengan mengedepankan kesepakatan kedua negara atau perintisan (*exit entry point*) dengan daerah/wilayah (*counterpart*) negara tetangga/saling keterhubungan secara fungsional (orang, barang dan media lainnya). Identifikasi dimaksudkan untuk memberikan kepastian pengawasan, pemantauan dan monitoring dan evaluasi pengelolaan lintas batas negara. Dalam hal ini identifikasi dilakukan di jalur lintas negara melalui laut di Provinsi Kepulauan Riau.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Kegiatan awal yang dilakukan meliputi tinjauan terhadap:

- a. Geografis, yang meliputi koordinat geografis TPI dan PLB
- b. Sumber daya yang ada, meliputi kondisi sumber daya alam yang ada baik berupa kualitas, dan kuantitasnya. Termasuk didalamnya kondisi prasarana dan sarana, dan tingkat pelayanannya;
- c. Kondisi sosial ekonomi budaya yang meliputi kondisi demografi, perkembangan penduduk, kondisi perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan tingkat kesejahteraan;

Data primer diperoleh dari obyek kajian secara langsung melalui observasi secara langsung dan wawancara guna memperoleh hasil/data yang komprehensif mengenai kondisi eksisting, rencana pengembangan dan harapan TPI dalam kerangka

pembangunan. Data primer diperoleh dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Adapun muatan data dan informasi yang didapatkan di lapangan adalah sebagai berikut:

- 1) Administrasi pemerintahan, meliputi :
 - Peta lokasi PLBN dan sekitarnya;
 - Wilayah administrasi, Cakupan Wilayah Administrasi (CWA) adalah Provinsi, Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) adalah kabupaten/Kota, dan Lokpri;
 - Kelembagaan (Manajemen pengelolaan, pemangku kepentingan terkait, sistem anggaran pengelolaan dan pengembangan dalam konteks penataan ruang).
- 2) Data/nama wilayah yang menjadi counterpart/resipokal negara tetangga;

Tahap Pengolahan Data

Hasil pengumpulan data sekunder dan data kunjungan lapangan menjadi bahan masukan dalam proses pengolahan data. Kegiatan pengolahan data meliputi:

- a. Pemetaan aktifitas batas (barang dan orang) dan permasalahan dalam setiap Jalur Lintas Negara di Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Pemetaan potensi dan permasalahan pengelolaan PLBN dan TPI di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Pemetaan jalur lintas Negara masing-masing PLBN dan TPI di Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Imigrasi dengan data TPI di Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Pelindo dengan data Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau;
- f. Kantor Kesehatan Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau.

Analisis dan Kajian

Hasil pengumpulan data sekunder dan data kunjungan lapangan menjadi

bahan masukan dalam proses analisis. Kegiatan analisis dan kajian meliputi :

- a. Analisis Kebijakan Pengembangan Wilayah;

Proses analisis dan kajian dimulai dari hasil tinjauan atau kajian awal tentang kebijakan dan strategi pengembangan TPI yang ada, baik berupa kebijakan tingkat pusat, daerah, maupun kebijakan sektoral, terutama yang didasarkan pada RTRW. Hasil analisis tentang kebijakan dan peraturan (RTRW) dimaksudkan untuk mengetahui visi, misi, dan arah pengembangan wilayah, sektor atau komoditi andalan, fungsi dan peran TPI dalam lingkup yang lebih luas.

- b. Analisis Karakteristik Fisik, Ekonomi, Sosial Budaya;

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik atau profil TPI yang ada di wilayah yang telah ditentukan. Analisis fisik diharapkan dapat mengetahui potensi sumber daya alam, daya dukung wilayah dan lingkungan. Analisis ekonomi bertujuan untuk menemukenali potensi dan permasalahan perekonomian, mengetahui komoditas andalan, potensi komoditas yang ada, dan kebutuhan pasar. Sedangkan analisis sosial budaya diharapkan dapat diketahui potensi dan permasalahan sosial budaya yang antara lain meliputi pola perkembangan penduduk, potensi ketenagakerjaan, dan tingkat kesejahteraan. Analisis sosial budaya dapat dilihat dari beberapa indikator yang menggambarkan ukuran pencapaian tingkat kesejahteraan.

- c. Analisis Potensi dan Peluang Pengembangan TPI

Kegiatan analisis ini bertujuan untuk mengkaji dan mencari potensi-potensi yang dimiliki oleh TPI berdasarkan karakteristik wilayah tersebut, yang meliputi faktor fisik lingkungan, ekonomi wilayah, dan faktor sosial budaya, serta kajian tentang

kelembagaan yang ada. Potensi dan sektor andalan diperoleh dari hasil analisis wilayah (fisik, ekonomi, sosial) yang berpengaruh pada pengembangan kawasan yang kemudian disusun dalam suatu tabel potensi dan sektor andalan sehingga dapat diketahui aspek yang memberikan kontribusi positif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Di Wilayah Pemetaan

Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara. Keberadaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Republik Indonesia dengan negara tetangga. PPLB paling sedikit terdapat unsur bea dan cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan (Indonesia, 2016). Keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) beserta fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS) sebagai gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di kawasan perbatasan sangat penting. Sebagai pintu gerbang negara, sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di wilayah negara tetangganya. Disamping itu adanya sarana dan prasarana perbatasan akan mengurangi keluar-masuknya barang-barang illegal.

Survei PLB di Provinsi Kepulauan Seribu dilakukan dengan mengacu pada data sekunder yang diperoleh dari website resmi Keimigrasian Republik Indonesia dan informasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil survei menunjukkan bahwa sampai saat ini di Provinsi Kepulauan Seribu terdapat beberapa PLB yang aktif dan beberapa lainnya tidak aktif.

Beberapa PLB yang aktif diantaranya adalah :

1. PLB Moro
PLB Moro terletak di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. PLB ini berupa pelabuhan rakyat, dimana orang yang keluar - masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhan ini merupakan kru kapal yang mengangkut ikan untuk keperluan impor ke Malaysia.
2. PLB Mapur
Informasi tentang adanya PLB Mapur diperoleh dari website resmi Keimigrasian Republik Indonesia. Namun setelah dikonfirmasi ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemda Kabupaten Bintan serta berdasarkan survei lapangan, diketahui bahwa tidak ada PLB yang berada di pulau ini.
3. Belakang Padang
PLB Belakang Padang terletak di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. PLB ini berupa pelabuhan rakyat, dimana orang yang keluar - masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhan ini merupakan kru kapal yang mengangkut ikan untuk keperluan impor ke Singapura.
4. Teluk Bintan
Informasi tentang adanya PLB Teluk Bintan diperoleh dari website resmi Keimigrasian Republik Indonesia. Namun setelah dikonfirmasi ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemda Kabupaten Bintan serta berdasarkan survei lapangan, diketahui bahwa tidak ada PLB yang berada di Teluk Bintan.
5. Tarempa
Sejak tahun 2016, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia telah mengusulkan Pelabuhan Tarempa ini untuk ditetapkan sebagai pelabuhan keluar masuk bagi kapal pariwisata (*yacht*) asing.

Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Tarempa, saat ini ada tren peningkatan wisatawan asing yang mengunjungi Kabupaten Anambas menggunakan *yacht*, dimana pada tahun 2016 tercatat hanya 300 wisatawan, namun pada pertengahan 2017 sudah tercatat 360 wisatawan asing. Para yatcher itu berasal dari berbagai negara, seperti Kanada, Australia, Inggris dan Belanda.

3.2 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Di Wilayah Pemetaan

Sebelum survei lapangan, terlebih dahulu dihimpun informasi terkait TPI. Salah satu yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan survei adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2014 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Kepmen Hukham, 2016)

Hasil survei menunjukkan bahwa TPI yang telah ditetapkan dalam Kepmenkumham tersebut kebanyakan masih aktif, namun ada juga yang sudah tidak aktif. Selain itu terdapat TPI yang tidak disebutkan dalam Kepmen tersebut.

Berikut uraian hasil pemetaan beberapa TPI di wilayah Provinsi Kepulauan Riau

- Sri Bintang Pura
Pelabuhan ini masuk dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang dengan letak geografis 0° 93'07.67 LU dan 104° 43'99.33 BT. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan internasional yang melayani rute pelayaran ke Singapura tepatnya di Pelabuhan Tanah Merah. Jumlah penumpang setiap tahunnya mencapai ±15.000 orang dalam kondisi normal dan

>15000/ tahun jika ada even atau momen hari raya.

- Sri Baintan, di Tanjung Pinang
Informasi tentang adanya TPI di Sri Baintan diperoleh dari website resmi Keimigrasian Republik Indonesia. Namun setelah dikonfirmasi ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan berdasarkan survei lapangan, diketahui bahwa tidak ada TPI di pelabuhan ini.
- Bandar Bentan Telani Lagoi, di Tanjung Uban
Pelabuhan ini masuk dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bintan, dengan letak geografis 1° 09'07.35" LU dan 104° 15'19.16" BT. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan khusus yang melayani wisatawan asing dengan rute pelayaran ke Singapura tepatnya di Pelabuhan Tanah Merah. Jumlah penumpang setiap tahunnya mencapai ±240.000 orang.
- Bandar Seri Udana Lobam, di Tanjung Uban
Bandar Seri Udana Lobam memiliki dua jenis pelabuhan, yakni pelabuhan penumpang dan pelabuhan kargo, yang kedua-duanya melayani pelayaran internasional tujuan Negara Singapura. Jumlah penumpang yang melewati TPI di pelabuhan ini ±500 orang/ bulan.
- Tanjung Balai Karimun, di Tanjung Balai Karimun
Pelabuhan Tanjung Balai Karimun masuk di wilayah Kabupaten Karimun. Secara geografis pelabuhan ini terletak pada 0°59'02.40" LU dan 103°26'29.81" BT. Pelabuhan ini melayani pelayaran internasional dengan tujuan Pelabuhan Harbour Front di Singapura dan Pelabuhan Kukup di Malaysia.
- Belakang Padang, di Belakang Padang
Informasi tentang adanya TPI di Belakang Padang diperoleh dari

website resmi Keimigrasian Republik Indonesia. Namun setelah dikonfirmasi ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan berdasarkan survei lapangan, diketahui bahwa tidak ada TPI di pelabuhan ini.

3.3 Analisis Tipologi PLB / TPI di Kepulauan Riau

Setelah diperoleh hasil survei lapangan, maka selanjutnya dilakukan analisis terhadap tipologi PLB/ TPI yang

Tabel 1 Parameter Klasifikasi Tipologi PLB/ TPI

No	Indikator Penilaian	Keterangan	Pembobotan
1	Sistem Pemeriksaan	<i>on call</i>	10
		<i>permanent</i>	20
		Pemerintah	10
2	Management	Swasta	5
		Rakyat	5
		Tinggi	20
3	Intensitas Pergerakan Orang	Sedang	10
		Rendah	5
		Tidak ada	0
4	Jenis dan Intensitas Pengiriman Barang	Tinggi	20
		Sedang	10
		Rendah	5
5	Counterpart	tertuang	5
		dalam proses	2
		tidak tertuang	0
6	Aspek Kesesuaian Spasial	Sesuai	5
		Belum ditetapkan	2
		Tidak sesuai	0
7	<i>Multiflier Effect</i>	Tinggi	20
		Sedang	10
		Rendah	5
8	Fasilitas Pendukung	Modern	10
		Konvensional	5
		Tidak ada	0
9	Potensi Pengembangan	Besar	10
		Sedang	5
		Kecil	1

ada. Beberapa indikator yang dijadikan sebagai parameter penentuan tipe dari PLB/ TPI diantaranya adalah : system pemeriksaan imigrasi di pelabuhan, pengelola pelabuhan, intensitas pergerakan orang, intensitas pengiriman barang, Counterpart, Aspek Kesesuaian Spasial, *Multiflier Effect*, Fasilitas Pendukung, dan Potensi Pengembangan, dengan nilai bobot sebagaimana tertuang dalam Tabel 1 berikut.

Tipe A dengan total nilai 2.5 – 5, Tipe B dengan total nilai 5.1 – 7.5 dan Tipe C sebesar 7.5 – 10.

Klasifikasi PLB/TPI berdasarkan hasil analisis

Tipe A = 2.5 - 5

Tipe B = 5.1 - 7.5

Tipe C = 7.5 - 10

Hasil analisis tipologi PLB/ TPI tertuang dalam Tabel 2 berikut.

Adapun klasifikasi PLB/ TPI dalam kajian ini dibagi menjadi 3 tipe, yakni

Tabel 2 Hasil Analisis Tipologi PLB/ TPI di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kabupaten

No	Kabupaten	Kecamatan	Nama TPI/ PLB	Kriteria Kelayakan Pengembangan (Skor x bobot)									Total Nilai Bobot	Tipe PLPB / TPI
				Aspek Hukum (10%)		Aspek Fungsi Pemeriksaan (40%)			Aspek Sosekbud (40%)			Potensi (10%)		
				Status Count erpart (5%)	Kesesuaian Spasial (5%)	Fasilitas C.I.Q.S (10%)	Sistem C.I.Q.S (20%)	Unit Managemen (10%)	Multiflier Effect (20%)	Intensitas Pergerakan Orang (20%)	Intesitas Barang (20%)	Sumber Daya Pendukung (10%)		
1	Kota Batam	Belakang Padang	Belakang Padang	0.5	0.5	0.5	1	0.5	2	-	2	1	8	Tipe A
2	Kota Batam	Batu Aji	Marina Teluk Senimba	0.5	0.5	1	2	0.5	1	1	-	0.5	7	Tipe B
3	Kota Batam	Batam Kota	Batam Centre	0.5	0.5	1	2	1	2	2	-	1	10	Tipe A
4	Kota Batam	Batu Ampar	Pelabuhan Kargo Batu Ampar	0.5	0.5	1	2	1	2	2	-	1	10	Tipe A
5	Kota Batam	Sekupang	Pelabuhan Sekupang	0.5	0.5	1	2	1	2	2	-	1	10	Tipe A
6	Kota Batam	Batu Besar	Nongsapura Terminal bahari	0.5	0.5	1	2	1	2	2	-	1	10	Tipe A
7	Kota Batam	Nongsa	Pelabuhan Kabil	0.5	0.5	1	2	1	2	-	2	1	10	Tipe A
8	Bintan	Tanjung Uban	Pelabuhan Tanjung Uban	0	0.5	0	0	1	0.5	0	-	0.5	2.5	Tipe C
9	Bintan	Bintan Utara	Pelabuhan Bandar Seri Udana (Lobam)	0.5	0.5	1	2	0.5	1	1	-	0.5	7	Tipe B
10	Bintan	Teluk Sebung	Bantar Bentan Telani (Lagoi)	0.5	0.5	1	2	0.5	1	2	-	0.5	8	Tipe A
11	Bintan	Teluk Sebung	Teluk Bintan	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
12	Kota Tj. Pinang	Tj Pinang Kota	Pelabuhan Sri Bintan Pura	0.5	0.5	1	2	1	2	2	-	1	10	Tipe A
13	Karimun	Moro	Pulau Moro	0.5	0.5	0.5	1	0.5	2	-	1	1	7	Tipe B
14	Karimun	Kundur	Pulau Tanjung Batu	0.5	0.5	0.5	1	0.5	2	-	1	1	7	Tipe B
15	Anambas	Siantan	Pelabuhan Tarempa	0.5	0.5	0.5	1	1	2	1	-	1	7.5	Tipe B
16	Natuna	Serasan	Pelabuhan Serasan	0.2	0.5	0	0	0.5	2	1	-	1	5.2	Tipe C
17	Kota Batam	Batu Ampar	Harbour Bay	0.5	0.5	1	2	1	1	2	-	0	8	Tipe A

No	Kabupaten	Kecamatan	Nama TPI/ PLB	Kriteria Kelayakan Pengembangan (Skor x bobot)										Total Nilai Bobot	Tipe PLPB / TPI
				Aspek Hukum (10%)		Aspek Fungsi Pemeriksaan (40%)			Aspek Sosekbud (40%)			Potensi (10%)			
				Status Count erpart (5%)	Kesesuaian Spasial (5%)	Fasilitas C.I.Q.S (10%)	Sistem C.I.Q.S (20%)	Unit Managemen (10%)	Multiflier Effect (20%)	Intensitas Pergerakan Orang (20%)	Intesitas Barang (20%)	Sumber Daya Pendukung (10%)			
18	Karimun	Karimun	Pelabuhan TBKar	0.5	0.5	1	2	1	2	2	-	1	10	Tipe A	

IV. KESIMPULAN

Hasil identifikasi lintas batas negara jalur laut di Kepulauan Riau menunjukkan bahwa penumpang yang melewati TPI/PLB mempunyai tipe yang berbeda dalam hal keperluan penumpang yang masuk dan keluar negeri melalui TPI/PLB. wilayah ini rawan terhadap penyelundupan narkoba mengingat banyaknya pulau yang tersebar di Provinsi ini. Persoalan yang paling umum ditemui pengelola pelabuhan dimana TPI/PLB berada adalah terjadinya pendangkalan dan abrasi. Hasil survei menunjukkan bahwa ada beberapa TPI (pelabuhan) dimana sebagian penumpangnya merupakan orang Indonesia yang keluar masuk melalui TPI tersebut untuk keperluan menjadi tenaga kerja di Malaysia dengan menggunakan paspor wisata. Banyaknya komoditas ekspor di jalur lintas Negara di Sumatera merupakan hal yang harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Beberapa komoditas yang saat ini telah diekspor melalui jalur lintas Negara di Sumatera diantaranya adalah ikan, sagu, kelapa, dll. Hasil survei menunjukkan bahwa aktifitas ekspor di jalur lintas Negara di Sumatera dilakukan melalui pelabuhan rakyat. Namun demikian sangat disayangkan bahwa fasilitas pelabuhan rakyat di wilayah ini masih kurang memadai untuk melayani kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan tersebut. Di Sumatera belum tersedia PLB yang representatif untuk mengekspor barang/ komoditas hasil alam dan produksi masyarakat lokal ke Negara tetangga. Hal ini dapat ditemukan di Pelabuhan Rakyat Belakang Padang,

Pelabuhan Rakyat Panipahan, Pelabuhan Rakyat di Pulau Moro, Pelabuhan Rakyat Tanjung Batu, dll, semuanya masih sangat terbatas dalam hal fasilitas dan aksesibilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589*. Jakarta.

Indonesia, 2017. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*. Jakarta.

Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat dan Tujuan Bagi Kedatangan Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan*. Jakarta.

Indonesia 2015. *Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019. Tahun 2015*. Jakarta.

Kepmen Hukham, 2016. *Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Nomor M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2014 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi*. Jakarta.